

Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya Tahun 2020–2024 Berdasarkan GRI Standar 2021

Rahmawati ^{1*}, Arie Pratama ², Annisa Nabila Hasan ³

^{1, 2, 3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

* rahmawati22002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi tingkat kesesuaian pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024 berdasarkan *Global Reporting Initiative* guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keberlanjutan organisasi. Pelaporan keberlanjutan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada para pemangku kepentingan, namun kajian pada sektor nirlaba di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengungkapan laporan keberlanjutan pada Yayasan Bina Swadaya sebagai objek penelitian, dengan sampel berupa laporan keberlanjutan periode 2020–2024 yang dipublikasikan oleh organisasi tersebut di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara sebagai triangulasi data. Instrumen penelitian berupa indeks pengungkapan berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* 2021, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan pada dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sosial menjadi aspek paling dominan, sementara tingkat pengungkapan masih bervariasi antar periode dan belum sepenuhnya sistematis, terutama setelah transisi standar pelaporan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas organisasi, perubahan standar, dan ketersediaan data memengaruhi kualitas pelaporan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan sistem pelaporan yang lebih terstruktur, berbasis data kuantitatif, dan selaras dengan standar untuk meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan pada organisasi nirlaba. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek pada organisasi nirlaba lain atau menggunakan periode yang lebih panjang.

Kata Kunci: *Laporan Keberlanjutan, Global Reporting Initiative, Ekonomi, Lingkungan, Sosial*

Pendahuluan

Era sekarang dunia sedang menghadapi tiga krisis besar yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis*, yaitu perubahan iklim (*climate change*), kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), serta polusi dan limbah (*pollution and waste*) (Qutbi et al., 2024). Krisis-krisis tersebut tidak hanya disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tetapi juga diperparah oleh ketimpangan global yang menyebabkan dampaknya lebih berat dirasakan oleh negara berkembang dan kelompok masyarakat rentan yang bukan merupakan penyumbang utama kerusakan lingkungan (Afiff, 2022; Saputra, 2025).

Berbagai negara mulai merumuskan dan menerapkan kebijakan keberlanjutan yang diadopsi secara global, seperti integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam regulasi organisasi serta pemberian insentif bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan (Mishra, 2024; Purwanti, 2023). Konsep keberlanjutan (*sustainability*) menjadi isu global yang semakin penting seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan serta

keterbatasan sumber daya alam. Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui laporan *Our Common Future* oleh Komisi Brundtland PBB pada tahun 1987, yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Isu keberlanjutan kemudian semakin menguat melalui agenda pembangunan global seperti *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memuat 17 tujuan dan 169 target untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (Breuer et al., 2019).

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap agenda keberlanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta integrasi SDGs ke dalam kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 (Farhan et al., 2025; Susanti et al., 2025). Komitmen ini diperkuat melalui integrasi keberlanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) tahun 2022, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Effendi & Sonaji, 2021).

Realisasi pengurangan emisi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, emisi karbon nasional masih berada pada tingkat yang tinggi, dengan sektor energi, transportasi, limbah, dan industri sebagai kontributor utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk organisasi non-profit yang turut berperan dalam mendorong praktik pembangunan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal.

Organisasi non-profit di Indonesia, termasuk yayasan pemberdayaan masyarakat, memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam isu ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah Yayasan Bina Swadaya yang aktif mendorong praktik pertanian berkelanjutan melalui pengurangan penggunaan pestisida kimia dan pengembangan model pertanian ekologis. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas petani, tetapi juga membantu mengurangi tekanan lingkungan akibat praktik pertanian intensif (Widiarta et al., 2025). Praktik keberlanjutan dalam organisasi nirlaba juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya paradoks keberlanjutan, di mana organisasi yang mempromosikan program keberlanjutan di masyarakat belum sepenuhnya mampu mengurangi dampak lingkungan dari operasional internal mereka (Brendel et al., 2025; Yunus et al., 2025). Selain itu, keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada kemitraan pemerintah, serta belum adanya standar pelaporan yang konsisten menyebut kontribusi organisasi non-profit terhadap keberlanjutan sering kali sulit diukur secara akurat (United Nations Environment Programme, 2024).

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan memungkinkan organisasi untuk mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitasnya secara sistematis dan terukur (Oktariyani, 2022; Maradiana et al., 2026). Secara global, *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan karena menyediakan kerangka pelaporan yang komprehensif dan dapat diterapkan pada berbagai sektor organisasi, termasuk sektor non-profit. Di Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan masih didominasi oleh sektor

korporasi, terutama setelah diterapkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan secara berkala (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sebaliknya, praktik pelaporan keberlanjutan pada organisasi nirlaba masih relatif terbatas. Salah satu yayasan yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan adalah Yayasan Bina Swadaya yang menggunakan acuan *Global Reporting Initiative Standards* dalam pelaporan.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kualitas dan perkembangan pengungkapan laporan keberlanjutan pada organisasi nirlaba di Indonesia masih sangat terbatas (Rizieq & Fadholi, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya selama periode 2020–2024 berdasarkan GRI Standards 2021. Analisis dilakukan secara longitudinal untuk melihat perkembangan kualitas, konsistensi, serta kedalaman pengungkapan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan yayasan dari waktu ke waktu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai praktik pelaporan keberlanjutan pada sektor organisasi nirlaba di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi yayasan dan organisasi non-profit lainnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji pengungkapan laporan keberlanjutan pada organisasi nirlaba secara longitudinal selama periode 2020–2024 serta mengevaluasi tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan berdasarkan GRI Standards 2021. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat pengungkapan, tetapi juga membandingkan perkembangan antarperiode serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi variasi pengungkapan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur pelaporan keberlanjutan pada sektor non-profit serta memberikan implikasi praktis bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan yang lebih sistematis dan terukur.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya pada sektor non-korporasi (Chandra & Suwarno, 2024). Studi pada pemerintah daerah di Indonesia dan Eropa menunjukkan bahwa pengungkapan berbasis GRI masih belum lengkap dan cenderung bersifat deskriptif tanpa dukungan data kuantitatif yang memadai (Pratama, 2024). Penelitian lain juga menemukan bahwa kualitas pelaporan dipengaruhi oleh faktor institusional, kapasitas organisasi, serta tekanan pemangku kepentingan, namun implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan data dan kesiapan organisasi (Fadillah, 2023). Selain itu, studi internasional menunjukkan adanya ketidakkonsistenan indikator dan rendahnya standardisasi dalam pengungkapan keberlanjutan, sehingga menyulitkan keterbandingan antarorganisasi (Prasetyo & Wulandari, 2023). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kerangka pelaporan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan (Effendi & Sonaji, 2021).

Meskipun penelitian mengenai pelaporan keberlanjutan telah berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada sektor korporasi atau pemerintah, sementara kajian pada organisasi nirlaba, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga belum mampu menggambarkan dinamika perkembangan pengungkapan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana kualitas, konsistensi, dan kedalaman pengungkapan laporan keberlanjutan pada organisasi non-profit berkembang dari waktu ke waktu.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kualitas dan kedalaman pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya. Subjek penelitian ini adalah laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024, yang dipilih sebagai unit analisis karena merupakan organisasi nirlaba yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi yayasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) Standards 2021. Tahapan analisis data meliputi: (1) identifikasi dan klasifikasi indikator GRI yang relevan pada setiap laporan; (2) pengkodean tingkat pengungkapan berdasarkan skala penilaian yang telah ditetapkan; (3) penilaian kualitas dan kedalaman pengungkapan untuk setiap indikator; (4) perbandingan hasil pengungkapan antarperiode pelaporan; serta (5) interpretasi hasil untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor yang memengaruhi variasi pengungkapan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan yayasan.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Aspek yang Diamati
Pengungkapan Keberlanjutan	GRI 1: Landasan 2021	Kepatuhan terhadap penggunaan prinsip pelaporan
	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Kesesuaian pengungkapan umum dengan standar GRI
	GRI 3: Topik Material 2021	Penentuan topik material dan daftar topik material
	GRI Seri 200, 300, dan 400	1. Pemenuhan GRI seri 200 indikator ekonomi. 2. Pemenuhan GRI seri 300 indikator lingkungan. 3. Pemenuhan GRI seri 400 indikator sosial.

Tabel 1 menunjukkan operasionalisasi konsep pengungkapan keberlanjutan yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada GRI Standards 2021. Setiap indikator yang digunakan, mulai dari GRI 1, GRI 2, GRI 3, hingga GRI seri 200, 300, dan 400, menggambarkan aspek-aspek yang diamati dalam menilai tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Aspek tersebut mencakup kepatuhan terhadap prinsip pelaporan, kesesuaian pengungkapan umum, serta penentuan topik material yang relevan, termasuk pemenuhan indikator pada dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Operasionalisasi ini menjadi dasar dalam mengukur tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan secara sistematis.

Berdasarkan operasionalisasi konsep tersebut, pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui beberapa teknik yang relevan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, seperti laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024, pedoman GRI Standards 2021, serta dokumen organisasi lainnya yang berkaitan dengan praktik pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan meninjau berbagai literatur akademik seperti buku metodologi, jurnal ilmiah, serta dokumen dari organisasi internasional guna memperkuat landasan teori penelitian (Hart, 2018). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman GRI Standards 2021 (Krippendorff, 2022).

Tabel 2. Skala Indeks Pengungkapan Materialitas

Skor	Tipe Pengungkapan
0	Laporan tidak ada informasi apapun
1	Laporan hanya berisi informasi kualitatif tanpa adanya penjelasan lebih lanjut
2	Laporan berisi informasi kualitatif dengan beberapa bukti pendukung.
3	Laporan mengemukakan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan data numerik.
4	Laporan menyajikan informasi (kualitatif dan kuantitatif) disertai perbandingan atau praktik terbaik sesuai pedoman standar GRI 2021.

Tabel 2 diatas menunjukkan skala indeks yang digunakan untuk menilai tingkat kedalaman pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan, mulai dari skor 0 (tidak ada informasi) hingga skor 4 (pengungkapan paling lengkap yang mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif sesuai pedoman GRI 2021).

Tabel 3. Predikat Tingkat Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Predikat	Nilai indeks (%)
Sangat Informatif	81 – 100
Informatif	66 – 80
Kurang Informatif	51 – 65
Tidak Informatif	0 – 50

Tabel 3 menunjukkan klasifikasi predikat tingkat kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan nilai indeks yang dihasilkan. Rentang nilai indeks dibagi menjadi empat kategori, yaitu sangat informatif (81–100), informatif (66–80), kurang informatif (51–65), dan tidak informatif (0–50). Klasifikasi ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil perhitungan indeks pengungkapan sehingga memudahkan dalam menilai tingkat kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan secara lebih terstruktur dan komparatif antarperiode. Dengan adanya klasifikasi tersebut, hasil perhitungan indeks dapat dianalisis secara lebih sistematis.

Nilai indeks GRI yang telah dihitung pada setiap indikator kemudian ditabulasi secara kumulatif untuk menggambarkan tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan pada setiap periode. Hasil skor selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel perbandingan dan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan perkembangan pengungkapan berdasarkan pedoman GRI Standards 2021. Untuk memperoleh indeks kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, total skor dihitung menggunakan rumus dari (Anggraeni & Djakman, 2018).

$$QSR = \frac{SQSR}{SQMAX} \times 100\%$$

Keterangan:

QSR = Kualitas Pengungkapan *sustainability report*

SQSR = Skor Aktual Pengungkapan

SQMAX = Skor Maksimum yang mungkin dicapai

Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil analisis laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya dengan referensi tambahan seperti pedoman GRI Standards 2021, literatur akademik, serta dokumen pendukung lainnya. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengacu pada konsep dan teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka mengenai pelaporan keberlanjutan. Selain itu, uji konfirmabilitas dilakukan melalui diskusi dengan informan ahli, yaitu akademisi dan praktisi yang memiliki pemahaman dalam bidang keberlanjutan dan pelaporan organisasi.

Hasil

Isu Keberlanjutan Material dalam Laporan Yayasan Bina Swadaya 2020–2024

Tabel 4. Konteks Keberlanjutan yang material dalam Yayasan Bina Swadaya

Kategori Pengungkapan	Standar GRI
Ekonomi	GRI 201: Kinerja Ekonomi
	GRI 202: Keberadaan Pasar
	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	GRI 204: Praktik Pengadaan
	GRI 205: Anti Korupsi
Lingkungan	GRI 301: Material
	GRI 302: Energi
	GRI 303: Air dan Efluen
	GRI 304: Keanekaragaman Hayati
	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok
Sosial	GRI 401: Kepegawaian
	GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan
	GRI 405: Keanekaragaman dan peluang Setara
	GRI 406: Nondiskriminasi
	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif
	GRI 408: Pekerja anak
	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja
	GRI 410: Praktik Keamanan
	GRI 411: Hak Masyarakat Adat
	GRI 413: Masyarakat Setempat
	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok
	GRI 415: Kebijakan Publik
	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan
	GRI 418: Privasi Pelanggan

Berdasarkan tabel topik material, pengungkapan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024 telah mengacu pada pedoman pelaporan sektor filantropi yang disusun oleh Filantropi Indonesia bersama *Global Reporting Initiative*, yang mencakup GRI Seri 200 (ekonomi), GRI Seri 300 (lingkungan), dan GRI Seri 400 (sosial). Cakupan topik tersebut menunjukkan bahwa isu ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pengelolaan keuangan organisasi, tetapi juga kontribusi terhadap ekonomi lokal dan integritas tata kelola, sementara aspek lingkungan mencerminkan perhatian terhadap penggunaan sumber daya dan dampak operasional. Di sisi lain, dominasi pengungkapan pada aspek sosial menegaskan bahwa dimensi sosial merupakan inti materialitas Yayasan Bina Swadaya sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan dampak sosial berkelanjutan.

Tingkat Kesesuaian Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Standar GRI 2021

Hasil analisis tingkat kesesuaian (*compliance*) laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya terhadap standar universal (GRI 2 dan GRI 3) serta standar topik material (GRI 200, GRI 300, dan GRI 400) berikut disajikan pada tabel 5

Tabel 5. Perbandingan Kesesuaian Laporan Keberlanjutan Bina Swadaya 2020–2024

Tahun Laporan	Item yang Harus Dilaporkan	Total Item yang Harus Dilaporkan	% Topik yang Dilaporkan
2020	75	126	59.52%
2021	81		64.29%

Tahun Laporan	Item yang Harus Dilaporkan	Total Item yang Harus Dilaporkan	% Topik yang Dilaporkan
2022	80	100	63.49%
2023	52		52%
2024	51		51%

Berdasarkan Tabel 5, tingkat kesesuaian laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang cenderung berfluktuasi. Pada periode awal, tingkat kesesuaian relatif lebih tinggi dan stabil, yang mencerminkan konsistensi dalam pengungkapan berdasarkan pedoman yang digunakan saat itu. Namun, pada periode selanjutnya terlihat adanya penurunan tingkat kesesuaian. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap perubahan standar pelaporan dari GRI 2016 ke GRI Standards 2021 yang berdampak pada struktur dan jumlah indikator yang harus diungkapkan. Dengan demikian, variasi tingkat kesesuaian tidak hanya mencerminkan kinerja pelaporan organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan standar yang digunakan.

Perbandingan Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI Standards

Berdasarkan hasil skoring yang telah dilakukan terhadap tingkat pengungkapan (*disclosure*) laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024 dengan mengacu pada standar universal (GRI 1, GRI 2, dan GRI 3) serta standar topik material (GRI 200, GRI 300, dan GRI 400) dalam GRI Standards 2021, berikut akan disajikan perbandingannya:

Tabel 6. Perbandingan Kualitas Pengungkapan Laporan Bina Swadaya 2020–2024

Tahun Laporan	Skor Kualitas Kedalaman Pelaporan	Total Maksimal Skor GRI	% Kualitas Kedalaman Pelaporan	Predikat
2020	237	504	47%	Tidak Informatif
2021	272		54%	Kurang Informatif
2022	280		56%	Kurang Informatif
2023	165	400	41%	Tidak Informatif
2024	167		42%	Tidak Informatif

Kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya periode 2020–2024 menunjukkan adanya variasi dalam kedalaman informasi yang disajikan. Secara umum, kualitas pengungkapan masih belum konsisten antarperiode, dengan kecenderungan belum mencapai tingkat informatif secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan belum sepenuhnya memenuhi seluruh elemen pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI Standards 2021.

Beberapa indikator masih disajikan secara naratif tanpa didukung data kuantitatif yang memadai, seperti pada pengungkapan risiko korupsi yang hanya menyatakan tidak adanya insiden tanpa menyertakan ukuran yang terukur. Di sisi lain, pada periode tertentu terlihat adanya peningkatan kualitas pengungkapan yang ditandai dengan penyajian informasi yang lebih rinci dan terukur, sehingga mencerminkan upaya organisasi dalam meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan.

Tabel 7. Perbandingan Kualitas (Disclosure) Laporan Keberlanjutan Bina Swadaya 2020–2024

Jenis Standar	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Standar Universal: GRI 2 dan GRI 3	79.66% (Informatif)	84.75% (Sangat Informatif)	88.14% (Sangat Informatif)	84.85% (Sangat Informatif)	84.85% (Sangat Informatif)
Standar Topik Material: GRI 200, 300, & 400	25.75% (Tidak Informatif)	32.09% (Tidak Informatif)	30.60% (Tidak Informatif)	28.36% (Tidak Informatif)	26.12% (Tidak Informatif)

Berdasarkan Tabel 6 dan 7, kualitas pengungkapan berdasarkan jenis standar menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara standar universal (GRI 2 dan GRI 3) dan standar topik

material (GRI 200, GRI 300, dan GRI 400). Sepanjang periode 2020–2024, pengungkapan terhadap standar universal secara konsisten berada pada kategori informatif hingga sangat informatif. Pada tahun 2020 capaian sebesar 79,66% (informatif), kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 84,75% dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 88,14% (sangat informatif). Pada tahun 2023 dan 2024 capaian relatif stabil sebesar 84,85%. Hasil ini menunjukkan bahwa Yayasan Bina Swadaya telah mampu memenuhi sebagian besar indikator yang berkaitan dengan pengungkapan umum organisasi, seperti profil organisasi, tata kelola, strategi, serta proses penentuan topik material.

Pengungkapan pada standar topik material menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah dan secara konsisten berada pada kategori tidak informatif. Pada tahun 2020 capaian sebesar 25,75%, meningkat menjadi 32,09% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 30,60% pada tahun 2022, serta kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 28,36% dan 26,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial belum sepenuhnya disajikan secara mendalam dan terukur sesuai dengan elemen yang dipersyaratkan dalam standar GRI, sehingga masih memerlukan penguatan agar laporan keberlanjutan dapat memberikan gambaran dampak organisasi secara lebih komprehensif.

Perbandingan Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan Kategori Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Tabel 8. Perbandingan Compliance Laporan Lap. Bina Swadaya 2020–2024

Kategori	Total Item yang Harus Dilaporkan	Topik yang Dilaporkan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (GRI 200)	12 Item Pengungkapan	6 Item	7 Item	6 Item	5 Item	5 Item
Lingkungan (GRI 300)	19 Item Pengungkapan	4 Item	8 Item	6 Item	4 Item	6 Item
Sosial (GRI 400)	36 Item Pengungkapan	18 Item	16 Item	16 Item	15 Item	12 Item

Tabel 8 menunjukkan perbandingan tingkat kesesuaian pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial selama periode 2020–2024. Secara umum, jumlah topik yang dilaporkan masih menunjukkan variasi pada setiap periode pelaporan dan belum sepenuhnya mencakup seluruh item pengungkapan yang dipersyaratkan dalam standar GRI. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan laporan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi menjadi lebih komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan pedoman pelaporan keberlanjutan internasional.

Tabel 9. Kesesuaian Lap. Bina Swadaya 2020–2024

Kategori	Total Maksimal	Skor Kualitas Kedalaman Pelaporan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (GRI 200)	48	14 (29%)	14 (29%)	19 (40%)	18 (38%)	19 (40%)
Lingkungan (GRI 300)	76	7 (9%)	19 (25%)	13 (17%)	9 (12%)	15 (20%)
Sosial (GRI 400)	144	48 (33%)	53 (37%)	50 (35%)	49 (34%)	36 (25%)
		Tidak Informatif	Tidak Informatif	Tidak Informatif	Tidak Informatif	Tidak Informatif

Tabel 9 menunjukkan perbandingan tingkat kualitas kedalaman pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial selama periode 2020–2024. Secara umum, tingkat kualitas pengungkapan pada ketiga aspek tersebut masih berada pada kategori tidak informatif dan menunjukkan variasi capaian pada setiap tahun pelaporan.

Pembahasan

Pemahaman terhadap konteks keberlanjutan organisasi menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang dianggap material dalam pelaporan keberlanjutan. Topik material merupakan isu yang mencerminkan dampak paling signifikan organisasi terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk dampaknya terhadap hak asasi manusia (Global Reporting Initiative, 2021). Penentuan topik material bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, tujuan kelembagaan, serta dampak kegiatan terhadap para pemangku kepentingan. Dalam organisasi nirlaba seperti Yayasan Bina Swadaya, penentuan isu keberlanjutan tidak berorientasi pada laba, melainkan pada keberlanjutan program, akuntabilitas publik, serta penciptaan nilai sosial bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa organisasi non-profit lebih menekankan penciptaan nilai sosial dibandingkan nilai ekonomi semata (Ebrahim & Rangan, 2014; Greiling et al., 2020). Oleh karena itu, konteks keberlanjutan yayasan berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas komunitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Berdasarkan perspektif ekonomi, pengungkapan keberlanjutan pada Yayasan Bina Swadaya berfokus pada transparansi pengelolaan sumber daya dan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Pengungkapan kinerja ekonomi, distribusi nilai ekonomi, serta praktik tata kelola mencerminkan upaya organisasi dalam menjaga akuntabilitas kepada donor dan pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek utama dalam pelaporan keberlanjutan organisasi non-profit (Adhariani, 2021; Maroun & Atkins, 2022). Selain itu, kontribusi tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan menunjukkan bahwa organisasi non-profit turut berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Berdasarkan perspektif lingkungan, meskipun dampak langsung organisasi relatif terbatas dibandingkan sektor industri, pengungkapan aspek lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam praktik keberlanjutan. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab ekologis organisasi dalam mengelola dampak operasional serta mendukung program berbasis lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa organisasi tetap dituntut untuk mengungkapkan dampak lingkungannya meskipun skalanya kecil, sebagai bagian dari legitimasi dan transparansi publik (Lodhia & Jacobs, 2013; Farneti & Guthrie, 2008). Selain itu, keterlibatan organisasi dalam program berbasis lingkungan juga memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan perspektif sosial, dimensi ini menjadi aspek paling dominan dalam pelaporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya. Hal ini tercermin dari fokus organisasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, serta perlindungan kelompok rentan. Dominasi aspek sosial ini sejalan dengan karakteristik organisasi non-profit yang berorientasi pada penciptaan dampak sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mazzei & Tenuta, 2023; Ebrahim & Rangan, 2014). Pengungkapan terkait ketenagakerjaan, kesetaraan, hak asasi manusia, serta dampak terhadap masyarakat menunjukkan upaya organisasi dalam menciptakan nilai sosial secara berkelanjutan. Selain itu, fokus pada masyarakat lokal juga memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas.

Pengungkapan konteks dan isu keberlanjutan pada organisasi filantropi mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, pada organisasi nirlaba, dimensi sosial cenderung menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan mandat organisasi dalam menciptakan dampak sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan pada sektor non-profit lebih menitikberatkan pada

aspek sosial dibandingkan aspek lainnya (Greiling et al., 2020; Mazzei & Tenuta, 2023). Selain itu, transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan tetap menjadi elemen penting dalam memperkuat kredibilitas organisasi.

Kesesuaian Laporan Keberlanjutan Tahun 2020–2024 Berdasarkan Standar GRI 2021

Laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya telah menyatakan penggunaan standar GRI sebagai acuan pelaporan. Namun, penerapan prinsip pelaporan seperti kelengkapan, komparabilitas, dan akurasi belum sepenuhnya disajikan secara sistematis. Pada GRI 2, sebagian informasi dasar organisasi telah diungkapkan, seperti profil lembaga, struktur tata kelola, serta periode pelaporan, meskipun beberapa aspek seperti penjaminan eksternal dan rincian tertentu mengenai praktik tenaga kerja belum dijelaskan secara lengkap. Sementara itu, pada GRI 3 laporan belum menunjukkan proses identifikasi topik material secara metodologis sesuai pendekatan berbasis dampak, sehingga pengungkapan masih bersifat *program-based*.

Standar topik material (GRI 200, GRI 300, dan GRI 400), pengungkapan cenderung lebih dominan pada aspek sosial (GRI 400) yang sejalan dengan karakter Yayasan Bina Swadaya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, pengungkapan pada aspek ekonomi (GRI 200) dan lingkungan (GRI 300) masih relatif terbatas serta belum sepenuhnya disajikan secara kuantitatif sesuai indikator yang disyaratkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sistematisasi pengungkapan sesuai struktur GRI 2021 serta penyajian informasi berbasis dampak yang lebih terukur dan komparatif.

Perbandingan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2020–2024 Berdasarkan Kategori Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Yayasan Bina Swadaya merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan orientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga memperhatikan dimensi ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan yang holistik. Hal ini sejalan dengan konsep *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, kegiatan yayasan berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, berbagai program pemberdayaan masyarakat dan praktik ramah lingkungan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, penting untuk menilai kinerja keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya pada ketiga dimensi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan konsistensi pengungkapan kinerja keberlanjutan berdasarkan kategori ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan Standar GRI 2021 selama periode 2020–2024. Melalui perbandingan antarperiode pelaporan, dapat diidentifikasi capaian kinerja serta aspek yang masih memerlukan peningkatan dalam pengungkapan keberlanjutan organisasi.

Hasil analisis terhadap kinerja keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya berdasarkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai standar GRI 2021 menunjukkan variasi kualitas pengungkapan pada setiap kategori. Pada aspek ekonomi (GRI seri 200), tingkat kualitas pengungkapan selama periode 2020–2024 masih berada pada kategori tidak informatif dengan capaian berkisar antara 29% hingga 40%. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada beberapa

periode, kedalaman informasi yang disajikan masih relatif terbatas dibandingkan total indikator yang dipersyaratkan.

Pengungkapan ekonomi yayasan relatif lebih kuat pada topik GRI 201 (Kinerja Ekonomi) dan GRI 203 (Dampak Ekonomi Tidak Langsung), yang menjelaskan sumber pendanaan, distribusi nilai ekonomi, serta dampak program pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi komunitas. Namun demikian, sebagian besar informasi masih disajikan secara naratif dan belum didukung oleh data kuantitatif yang terstruktur sesuai indikator GRI, termasuk pada aspek GRI 205 (Anti Korupsi) yang hanya menyampaikan pernyataan umum tanpa rincian teknis yang terukur.

Dalam aspek lingkungan (GRI seri 300), kualitas pengungkapan juga masih berada pada kategori tidak informatif dengan capaian yang fluktuatif, yaitu berkisar antara 9% hingga 25% selama periode 2020–2024. Secara substansi, laporan telah memuat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan isu lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, edukasi lingkungan, pertanian berkelanjutan, serta upaya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki keterlibatan dalam isu lingkungan, meskipun sebagian besar masih terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Namun dari sisi pelaporan, informasi yang disajikan masih bersifat deskriptif dan belum dilengkapi dengan data kuantitatif terkait indikator penting seperti konsumsi energi, emisi, maupun pengelolaan limbah, sehingga skor pengungkapan pada beberapa indikator belum optimal.

Dalam kategori sosial (GRI seri 400), kualitas pengungkapan juga masih berada pada kategori tidak informatif dengan capaian berkisar antara 25% hingga 37% selama periode pelaporan. Meskipun aspek sosial merupakan fokus utama kegiatan yayasan, kedalaman informasi yang disajikan masih terbatas. Beberapa topik seperti ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keberagaman telah diungkapkan melalui kebijakan dan praktik organisasi, namun belum didukung oleh data kuantitatif yang komprehensif. Pada topik masyarakat (GRI 413), laporan telah memuat berbagai program pemberdayaan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, tetapi belum menggambarkan capaian program secara terukur. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas sosial yayasan cukup luas, kualitas pelaporannya masih perlu diperkuat melalui penyajian data yang lebih konsisten, terukur, dan terintegrasi agar mampu merepresentasikan dampak sosial organisasi secara lebih komprehensif sesuai standar GRI.

Faktor yang Memengaruhi Variasi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020–2024

Variasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi internal organisasi maupun dinamika eksternal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kesiapan finansial organisasi. Penyusunan laporan keberlanjutan memerlukan sumber daya yang cukup besar, baik dalam bentuk biaya, tenaga kerja, maupun waktu untuk melakukan pengumpulan data, koordinasi antarunit kerja, hingga penyusunan laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Pada organisasi nirlaba, sumber pendanaan umumnya berasal dari donor, hibah, atau program kerja tertentu sehingga alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penyusunan laporan keberlanjutan belum selalu menjadi prioritas utama dalam penggunaan sumber daya organisasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kelengkapan dan kedalaman pengungkapan informasi keberlanjutan yang disajikan.

Tekanan dari para pemangku kepentingan juga turut memengaruhi variasi pengungkapan laporan keberlanjutan. Pemangku kepentingan organisasi nirlaba meliputi donor, mitra lembaga, pemerintah, masyarakat penerima manfaat, serta publik secara umum yang semakin menaruh perhatian pada transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan menjadi sarana penting bagi organisasi untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semakin tinggi tuntutan dari para pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka organisasi cenderung terdorong untuk meningkatkan kualitas serta cakupan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Sebaliknya, apabila tekanan dari pemangku kepentingan relatif rendah, organisasi mungkin belum merasa perlu untuk mengembangkan sistem pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif.

Faktor lain yang turut memengaruhi variasi pengungkapan adalah ketersediaan data serta sistem pengelolaan data keberlanjutan di dalam organisasi. Penyusunan laporan keberlanjutan membutuhkan berbagai jenis data, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, seperti data kegiatan sosial organisasi, dampak program terhadap masyarakat, maupun informasi terkait aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam praktiknya, data tersebut sering kali tersebar di berbagai unit kerja dan belum terdokumentasi secara sistematis sehingga menyulitkan proses pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi data yang diperlukan untuk memenuhi indikator dalam standar pelaporan keberlanjutan. Selain itu, variasi pengungkapan juga dipengaruhi oleh tata kelola organisasi, komitmen manajemen terhadap isu keberlanjutan, serta tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap standar pelaporan seperti GRI. Organisasi yang memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan serta pemahaman yang lebih baik terhadap standar pelaporan cenderung mampu menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan informatif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan Yayasan Bina Swadaya selama periode 2020–2024 telah mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai dengan kerangka GRI Standards. Tingkat kesesuaian laporan menunjukkan adanya perbedaan antarperiode, di mana laporan periode 2020–2022 masih mengacu pada GRI Standards 2016, sedangkan periode 2023–2024 mulai menyesuaikan dengan GRI Standards 2021. Variasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pelaporan keberlanjutan di Yayasan Bina Swadaya masih dalam tahap perkembangan dan dipengaruhi oleh perubahan standar, struktur indikator, serta kapasitas organisasi dalam menyusun laporan secara sistematis.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi nirlaba, khususnya Yayasan Bina Swadaya, perlu meningkatkan konsistensi dan kedalaman pengungkapan dengan mengacu secara lebih sistematis pada GRI Standards 2021, terutama pada aspek lingkungan yang masih terbatas. Selain itu, penting bagi organisasi untuk memperkuat penyajian data kuantitatif dan indikator kinerja agar laporan keberlanjutan menjadi lebih informatif, terukur, dan dapat dibandingkan antarperiode. Bagi organisasi non-profit secara umum, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas internal dalam penyusunan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai praktik pelaporan keberlanjutan pada sektor organisasi nirlaba di Indonesia yang masih relatif terbatas, khususnya melalui analisis longitudinal yang mengkaji perkembangan tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan berdasarkan GRI Standards 2021.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis hanya didasarkan pada laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh organisasi sehingga informasi yang diperoleh bergantung pada tingkat pengungkapan dalam dokumen tersebut. Selain itu, periode penelitian yang terbatas pada tahun 2020–2024 belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta menggunakan periode pelaporan yang lebih panjang atau menambahkan objek penelitian lain pada sektor organisasi nirlaba sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Afiff, S. (2022). Antropologi dan persoalan perubahan iklim: Perspektif kritis ekologi politik. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 109–118. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p109-118.2022>
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2018). Pengujian terhadap kualitas pengungkapan sustainability report perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Brendel J., Chen C., Keusch T., & Sautner Z. (2025). *The Value of NGO Activism**. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4758829>
- Breuer, A., Janetschek, H., & Malerba, D. (2019). Translating Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice. *Sustainability*, 11(7), 2092. <https://doi.org/10.3390/su11072092>
- Chandra, B. A., & Suwarno, E. M. (2024). Evaluasi pengungkapan laporan keberlanjutan berbasis GRI pada perbankan syariah Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 112–126. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2059>
- Effendi, H., & Sonaji, R. (2021). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 5(3), 759–787. <https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787>
- Effendi, H., & Sonaji, R. (2021). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 5(3), 759–787. <https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787>
- Fadillah, M. A. (2023). Sustainability reporting di Indonesia: Tantangan dan implementasi. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.32497/kia.v0i0.64>
- Farhan, M., Purnama, M. D., Haris, M. F. I., & Fatahillah, I. A. (2025). Efektivitas Regulasi Nasional Dalam Mendukung Target Nationally Determined Contributions (Ndc) Indonesia Sesuai Perjanjian Paris. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 119–136. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13283>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). SAGE Publications

- Krippendorff Klaus. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Maradiana, M., Soufyan, D. A., Vonna, S. M., Mahdani, R., & Sartika, D. (2026). Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Price Earning Ratio Perusahaan Sektor Kelapa Sawit yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023. *Journal Social Society*, 6(2), 1021–1033. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1191>
- Mishra, K. (2024). Impact of Policy Incentives on Adoption Rates of Renewable Energy Technologies: Global Perspectives. *Indian Journal of Renewable Energy (IJRE)*, 1(2), 8–14. <https://doi.org/10.36676/energy.v1.i2.12>
- Oktariyani, A. (2024). Analisis pengungkapan emisi karbon perusahaan dalam laporan tahunan dan keberlanjutan subsektor transportasi sebagai bentuk legitimasi perusahaan. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 487–500. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.633>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017.
- Prasetyo, H., & Wulandari, N. (2023). Akuntansi keberlanjutan dalam pelaporan perusahaan BUMN. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.33508/jako.v10i1.4127>
- Pratama, J. H. (2024). Pengungkapan kinerja sosial pada aspek sosial instansi pemerintah daerah melalui laporan keberlanjutan berbasis Global Reporting Initiative. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 7(2), 88–101. <https://doi.org/10.31967/jrea.v7i2.2117>
- Purwanti, A. (2023). Policy integration for achieving Sustainable Development Goals in sustainability reporting disclosure. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(2), 305–314. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i2.47033>
- Qutbi, A. A., Sarjan, M., & Sjah, T. (2024). Dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(2), 113–119. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i2.883>
- Riziq, A., & Fadholi, A. (2026). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk EMKM pada UMKM Global Media Cendekia. *Journal Social Society*, 6(1), 186–197. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.956>
- Saputra, H. P. (2025). Kapitalisme, perubahan iklim, dan eksklusi sosial: Implikasinya terhadap masyarakat adat. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v14i1.75909>
- Susanti, D. A., Silaban, F., Aritonang F, L., & Sitompul, Y. (2025). The Influence Of The Paris Climate Agreement On Energy And Environmental Policy Reform In Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 551–559. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5676>
- United Nations Environment Programme. (2024). Emissions gap report 2024: No more hot air ... please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments. *Nairobi: United Nations Environment Programme*. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>
- Widiarta I., Anindyasari D., Qamara C., & Aprylasari D. (2025). Community Empowerment and Sustainable Economic Development in Karang Tunggal Village, East Kalimantan. *Jurnal*

Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 06–14.

<https://doi.org/10.55606/jppmi.v4i1.1734>

Yunus, M. H., Baso, U. A., Nadia, N., Pradina, W. A., & Adnyani, N. K. D. (2025). Analisis Struktur Modal dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. BNI (Persero) Tbk Periode 2021-2024. *Journal Social Society*, 5(2), 1512–1522.

<https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.921>